



MEMBANGUN KAKAO RAKYAT

Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Kakao Fermentasi
Berbasis Kawasan Sentra Produksi di Sumatera Barat

Dr.Ir. Ira Wahyuni Syarfi, MS
Syofyan Fairuzi, S.TP, M.Si
Ferdhinal Asful, SP, M.Si

Prolog oleh Prof.Dr.Ir. Helmi, M.Sc.

PENGANTAR PENERBIT

Sidang Pembaca yang budiman,

Alhamdulillah, kiranya itulah kata yang senantiasa terucap dari kami. Buku yang ada di tangan Anda saat ini berjudul *MEMBANGUN KAKAO RAKYAT Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Kakao Fermentasi Berbasis Kawasan Sentra Produksi di Sumatera Barat*. Sesuai dengan judulnya, buku ini mencoba menghadirkan bagi khalayak pembaca segala sesuatu yang berhubungan dengan strategi pengembangan industri tanaman kakao fermentasi.

Harapannya, buku ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya bagi pengembangan perkebunan rakyat di tanah Minang. Tak lupa kami juga mengharapkan saran yang konstruktif atas tulisan yang telah kami terbitkan. Selamat membaca, dan semoga memberikan banyak manfaat bagi para pembacanya.

Padang, November 2011

Penerbit

PENGANTAR PENULIS

Pengembangan perkebunan telah menggunakan beberapa pola, yaitu: Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), Pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), Pola Swadaya dan Pola Perusahaan Perkebunan Besar. Pola pengembangan perkebunan kakao rakyat termasuk ke dalam pola pengembangan perkebunan swadaya. Terkait dengan pembangunan yang berbasis pengembangan potensi wilayah dalam perkebunan telah ada program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP) dan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun), serta dilanjutkan dengan Revitalisasi Perkebunan.

Perkebunan rakyat umumnya dicirikan dengan luas yang kecil per petani, penggunaan teknologi yang masih rendah, produksi dan produktivitas rendah, serta kualitas hasil yang juga rendah sangat berbeda dengan perkebunan besar dengan pengusahaan yang luas, intensif, produktivitas dan kualitas tinggi, dan orientasi efisiensi. Kakao adalah komoditi utama perkebunan rakyat¹. Tidak banyak perkebunan besar yang mengusahakan kakao, apalagi yang terlibat dalam membangun kebun rakyat dengan pola PIR. Dengan demikian membangun perkebunan kakao akan mempunyai pengaruh langsung terhadap peningkatan ekonomi rakyat atau meningkatkan kesejahteraan rakyat petani pekebun.

¹ Hal ini terlihat dari luas perkebunan kakao rakyat di Indonesia yang mencapai 93% (1.372 ha) dari total perkebunan kakao seluas 1.475 ha, dan di Sumatera Barat terdapat 98% (80.766 ha) perkebunan kakao rakyat dari total perkebunan kakao seluas 82.620 ha pada tahun 2008.

Salah satu pengembangan kawasan pembangunan perkebunan adalah kawasan perkebunan rakyat. Pengembangan kawasan perkebunan rakyat pada suatu sentra produksi, hendaknya didukung oleh sentra pengolahan, dan sentra perdagangan, berskala ekonomis serta didukung pemberdayaan kelembagaan petani guna mendorong pemanfaatan sumberdaya wilayah secara optimal dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan perumusan strategi yang lebih spesifik wilayah, berdasarkan kajian empiris dan perspektif yang tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Perspektif pembangunan perkebunan, pengembangan kawasan perkebunan rakyat, perkembangan kakao dan budidaya kakao yang tepat teknologi diuraikan pada Bab I buku ini. Perspektif agroindustri dan pengembangan agroindustri serta studi kelayakan diuraikan dalam BAB II. Ilustrasi empiris bagaimana realitas perkebunan kakao, potensi dan permasalahan pengembangan industri pengolahan kakao yang dilakukan oleh rakyat di Sumatera Barat diungkapkan pada BAB III. Berdasarkan realitas dan dinamika tersebut dirumuskan strategi pengembangan industri pengolahan kakao fermentasi berbasis kawasan sentra produksi di Sumatera Barat diuraikan pada BAB IV. Bagian terakhir buku ini (BAB V) dikemukakan implikasi kajian empiris atau model kebijakan pengembangan industri pengolahan kakao fermentasi berbasis kawasan sentra produksi di Sumatera Barat. Pada bagian penutup (BAB VI) dikemukakan model strategi

pengembangan kakao rakyat ini dapat direplikasi untuk kawasan perkebunan kakao rakyat di daerah lain.

Perlu disampaikan juga bahwa Buku MEMBANGUN KAKAO RAKYAT ini didasarkan pada kajian tentang "Pengembangan Industri yang Berbasis Bahan Baku Hasil Produk Pertanian, Studi Kasus Pengolahan Kakao Fermentasi" yang dilaksanakan atas kerjasama antara Lembaga Penelitian Universitas Andalas dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Provinsi Sumatera Barat tahun 2008. Kajian ini menunjang pencapaian Sumatera Barat sebagai penghasil kakao utama di Indonesia Bagian Barat yang telah dicanangkan tahun 2006. Kajian ini sengaja diupayakan untuk diterbitkan guna menunjang pengembangan industri pengolahan di Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 yang telah menetapkan bahwa Provinsi Sumatera Barat harus merealisasikan dan mengembangkan sepuluh Industri Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah yang salah satunya adalah pengolahan kakao, serta dilaksanakannya Gerakan Nasional Kakao di Sumatera Barat pada tahun 2011. Dengan demikian Pemerintah memang memegang peranan penting sekali dalam mendorong berkembangnya industri pengolahan kakao fermentasi berbasis kawasan sentra produksi perkebunan rakyat, disamping keterlibatan swasta, dan masyarakat serta perguruan tinggi, dll.

Kami sampaikan ucapan terimakasih pada petani kakao beserta kelompok tani di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Padang Pariaman sebagai sumber data, pengumpul data; Dodi Anwar, SE, MM, Yosfirman

SP, dan Regia Endah Kemala Sari, SP, MSi, serta informan kunci dari kelompok tani kakao, dan SKPD terkait perkebunan di lingkup Propinsi Sumatera Barat, serta para Pakar yaitu Agronomi (Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS), Pengolahan Hasil Pertanian terkait kakao (Ir. Aisman, MS) dan Pembangunan Pertanian (Prof. Dr. Ir. Helmi, MSc). Untuk berbagai pihak yang telah ikut membantu terlaksananya penelitian, penyusunan laporan, dan penulisan buku ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis juga mengucapkan terimakasih. Khusus untuk Ir. Fajarudin, Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat yang telah memberikan Kata Pengantar dan kepada Prof. Dr. Ir. Helmi, MSc., Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pembangunan Pertanian yang telah membuat Prolog untuk buku ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak.

Dengan membangun perkebunan rakyat berbasis kawasan sentra produksi diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan petani pekebun. Semoga hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk pembangunan perkebunan rakyat umumnya dan perkebunan kakao rakyat khususnya serta pembangunan industri pengolahan kakao, disamping bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam mengambil bagian dan berkontribusi bagi pengembangan kakao rakyat di Sumatera Barat dan daerah lainnya. Meskipun demikian penulis menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna, maka kritik dan masukan untuk kesempurnaan buku ini masih kami perlukan. Terima kasih.

Penulis

PROLOG
EKONOMI RAKYAT DAN PENGEMBANGAN
AGROINDUSTRI KAKAO
DI SUMATERA BARAT
Oleh: Helmi (Universitas Andalas)

Kakao adalah salah satu komoditi pertanian penting di Sumatera Barat. Pengusahaan tanaman ini sebagian besar dilakukan pada usahatani rakyat memanfaatkan lahan yang luasnya terbatas. Ada tiga hal yang terkait dengan realitas ini, yaitu: (1) pengembangan komoditi ini akan mempunyai pengaruh langsung terhadap peningkatan ekonomi rakyat dalam konteks pengentasan kemiskinan; (2) upaya pengembangan komoditi kakao memerlukan perhatian terhadap peningkatan nilai tambah (*value added*) melalui pengolahan hasil (pengembangan agroindustri) kakao; dan (3) diperlukan pendekatan kawasan untuk mencapai skala ekonomi dan proses pengolahan yang efisien.

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa strategi pengembangan agroindustri kakao perlu dikembangkan untuk daerah Sumatera Barat². *Pertama*, Sumatera Barat telah dicanangkan sebagai salah satu kawasan sentra produksi kakao di wilayah barat Indonesia. Areal budidaya tanaman kakao juga sudah dan terus diperluas melalui berbagai kegiatan baik yang dilakukan oleh

² Lihat Helmi (2007) Kerangka Kerja Pengembangan Agroindustri Kakao secara Terpadu dan Sinergi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Perekonomian Daerah Sumatera Barat. Makalah dipresentasikan pada Rapat Kerja 2007 Departemen Perindustrian Republik Indonesia. Hotel Pusako, Bukittinggi, 13-16 Maret 2007.

pemerintah maupun oleh masyarakat secara swadaya. *Kedua*, perlunya peningkatan upaya pengentasan kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang selalu bertambah. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, kemiskinan juga menjadi persoalan di Sumatera Barat. Data yang ada menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin Propinsi Sumatera Barat adalah sekitar 11%.

Ketiga, upaya peningkatan produksi kakao perlu diikuti dengan upaya pengolahan hasil untuk memperoleh nilai tambah yang lebih besar dalam menunjang perkembangan perekonomian daerah. *Keempat*, upaya pengembangan agroindustri memerlukan dukungan ketersediaan SDM yang handal dengan keahlian yang mendukung. Lembaga pendidikan dengan berbagai tingkatan (dari tingkat SMK sampai ke Perguruan Tinggi) yang relevan dengan pengembangan agroindustri ada di Sumatera Barat dan perannya perlu dioptimalkan. *Kelima*, pengembangan agroindustri adalah salah satu agenda pokok pembangunan Sumatera Barat (dalam kerangka revitalisasi pertanian). Pengembangan agroindustri kakao diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kinerja ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru dalam beberapa waktu kedepan sehingga dapat menurunkan proporsi penduduk miskin.

Kalau dicermati, konsep ekonomi rakyat ini diderivasi dari konsep perkembangan ekonomi dalam kepustakaan pembangunan ekonomi. Perkembangan ekonomi suatu negara atau masyarakat dapat dibagi kedalam dua kategori: "berkembang" (*developed*) dan

"kurang berkembang" (*underdeveloped*). Istilah berkembang dan kurang berkembang ini juga dipakai sebagai sinonim dari "kaya" dan "miskin" (yang kemudian menjadi negara atau masyarakat kaya atau miskin). Perekonomian terkebelakang secara lebih tajam diartikan sebagai: "perekonomian yang *tidak mempunyai cukup stok modal* untuk mempekerjakan semua angkatan kerja yang ada berdasarkan *teknik produksi yang modern*". Perekonomian negara atau masyarakat terkebelakang ditandai oleh *kemiskinan* massal yang kronis (yang bukan merupakan akibat bencana sementara), *metode produksi* dan *organisasi sosial* yang kurang mendukung kepada peningkatan kinerja.

Berdasarkan gambaran diatas maka secara sederhana ekonomi rakyat dapat dikatakan sebagai ekonomi dari kelompok masyarakat yang bercirikan "kemiskinan", kekurangan modal, ketertinggalan teknologi, ketidaktersediaan informasi, dan kapasitas organisasi sosial dan kelembagaan yang kurang memadai³. Dalam bahasa Mubyarto (1998)⁴, ekonomi rakyat adalah cara-cara rakyat bekerja/mencari nafkah untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Secara lebih spesifik ia mendefenisikan ekonomi rakyat sebagai: "bagian besar dari cara-cara rakyat bergumul dan bertahan untuk menjaga kelangsungan hidupnya: di pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan, dalam industri-industri kecil dan kerajinan, serta dalam perdagangan atau kegiatan swadaya lainnya, baik di daerah pedesaan

³ Lihat Jhingra, M.L. 1988. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali.

⁴ Lihat Mubyarto. 1998. *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*. Jogjakarta: Aditya Media.

maupun di perkotaan". Oleh sebab itu ia lebih jauh berargumentasi bahwa persoalan pengembangan ekonomi rakyat berkaitan dengan bagaimana membuka peluang bidang usaha bagi rakyat dan jaminan kekeluargaan untuk berkembang secara berkelanjutan dengan penekanan kepada pencapaian efisiensi melalui kerjasama. Dalam konteks membangun kerjasama ini maka pendekatan kawasan menjadi penting.

Dari tinjauan singkat diatas, dapat diidentifikasi diantara faktor penyebab keterbelakang ekonomi ini kelihatannya adalah kemandegan teknologi dan adanya faktor-faktor sosial ekonomi (termasuk pasar) dan kelembagaan yang menghambat meningkatnya kinerja ekonomi rakyat dan munculnya kekuatan-kekuatan yang lebih dinamis di dalam masyarakat. Artinya, ada ketidakberhasilan dalam melaksanakan perubahan teknologi, memperkuat organisasi sosial, dan organisasi ekonomi⁵. Dalam kaitan ini maka upaya pengembangan ekonomi (pada negara atau masyarakat terbelakang/miskin) memerlukan dan melibatkan upaya:

- reorientasi arah pembangunan, kebijakan dan pendekatan (termasuk keadilan distribusi aset dan akses ekonomi),
- reorganisasi kelembagaan dan pengaturan, dan
- peningkatan aplikasi teknologi yang sesuai dengan kondisi/lingkungan usaha petani kecil (seperti pendekatan kawasan), dalam rangka menumbuhkan keswadayaan rakyat dan menciptakan kekuatan-

⁵ Lihat Heisi (2005) Peran dan Kerangka Pengembangan Kelembagaan untuk Peningkatan Kinerja ekonomi Rakyat. Makalah dipresentasikan pada Seminar Strategi Penerapan IPTEK dalam Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Rakyat. Padang, BALITBANGDA Propinsi Sumatera Barat, 27 Agustus 2005.

kekuatan bagi perluasan ekonomi dan pemeliharaan pencapaian yang sudah didapat.

Pengembangan ekonomi rakyat tidak bisa dilepaskan dari peran dan intervensi birokrasi. Ada beberapa kecenderungan yang perlu dicermati terkait dengan pengembangan ekonomi rakyat. *Pertama*, peran instansi teknis pemerintah yang dominan dan kurang/tidak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program yang dijalankan. Akibatnya, program tersebut kurang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, sehingga cenderung untuk gagal.

Kedua, upaya untuk mengembangkan berbagai usaha ekonomi rakyat memerlukan keterlibatan berbagai instansi pemerintah yang lain sehingga memerlukan koordinasi. Tetapi koordinasi tersebut jarang terlaksana dengan baik.

Ketiga, jarang/tidak memberikan perhatian terhadap upaya pengembangan kelembagaan petani (dianggap kurang penting). *Keempat*, program yang dijalankan belum mengembangkan usaha ekonomi masyarakat sampai jadi serta jarang/tidak ada evaluasi terhadap pencapaian tujuan program/proyek. Kecenderungan-kecenderungan tersebut perlu menjadi perhatian dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan ekonomi rakyat yang berada dalam kondisi kemiskinan.

Karena sebagian besar dari rakyat miskin tersebut menyandarkan kehidupannya di sektor pertanian dalam pengertian luas (termasuk pertanian tanaman perkebunan), maka memacu pengembangan agroindustri hasil perkebunan menjadi amat penting dalam upaya meningkatkan kinerja ekonomi rakyat miskin ini. Artinya,

perlu dikembangkan agroindustri yang didukung oleh produksi bahan baku yang berkelanjutan. Semua ini diarahkan kepada penanganan kompleksitas sosial ekonomi petani terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan kemampuan memproduksi secara berkelanjutan.

Memacu perkembangan agroindustri tanaman perkebunan rakyat dan perkebunan besar barangkali berbeda strategi dan dinamikanya. Tanaman perkebunan rakyat melibatkan banyak petani dengan skala usaha yang relatif kecil dan kondisi finansial dan kelembagaan yang lemah. Upaya memacu pertumbuhan agroindustri tanaman perkebunan rakyat ini memerlukan adanya peran birokrasi publik dalam memberikan kerangka kebijakan, dukungan program (dalam hal ini seringkali lemah) dan pendekatan kawasan yang terkait dengan skala ekonomi dan efisiensi.

Disamping itu diperlukan juga peningkatan kemampuan kelembagaan dan SDM lokal dalam mengelola usahatani dan agroindustri tersebut. Oleh sebab itu, maka upaya memacu pertumbuhan agroindustri tanaman perkebunan tidak dapat dilakukan secara terpisah atau terisolasi dari realitas sosial ekonomi masyarakat. Artinya, agroindustri yang dipacu perkembangannya tersebut adalah agroindustri yang mengolah komoditi yang dihasilkan secara lokal dan menjadi basis ekonomi rakyat⁶. Dengan demikian maka

⁶ Untuk diskusi tentang perspektif pengembangan teknologi agroindustri ini selengkapnya dapat dilihat Helmi (2002) *Perspektif Sosial Ekonomi dalam Memacu Agroindustri Berbasis Komoditi Unggulan Daerah*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional "Status dan Perkembangan Teknologi untuk Memacu Agroindustri Berbasis Komoditi Unggulan Daerah", yang dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis Ke-48 Fakultas Pertanian Padang, 7 - 8 Agustus 2002.

masyarakat setempat akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dari produk yang mereka hasilkan sehingga pendapatan mereka akan meningkat.

Walaupun kelihatannya agroindustri tanaman perkebunan menjanjikan harapan bagi peningkatan ekonomi rakyat tetapi perkembangannya belumlah seperti yang diharapkan. Disinilah pentingnya perumusan strategi yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Berbagai program dan kegiatan pengembangan agroindustri sudah dilakukan oleh pemerintah. Sebagian dari program tersebut dalam bentuk pemberian bantuan peralatan dan/atau pelatihan. Bantuan tersebut, sebagiannya telah berhasil dalam mendorong berkembangnya agroindustri di berbagai daerah. Namun demikian, sebagian lainnya belum memperlihatkan hasil seperti yang diharapkan. Dari program dan kegiatan yang sudah terlaksana tersebut ada beberapa kecenderungan yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan agroindustri ke depan.

- Pemberian bantuan sering tidak disejalkan dengan upaya pengembangan kelembagaan untuk mengelola agroindustri tersebut. Akibatnya, kepemilikan dari peralatan/mesin bantuan tersebut tidak jelas sehingga kemudian tidak termanfaatkan secara optimal.
- Tenaga pengelola dan operator belum dipersiapkan/dilatih sehingga alat/mesin yang diterima tidak dapat difungsikan.
- Suplai energi tidak tersedia/tidak mencukupi dan jalan akses kondisinya tidak mendukung.

- Pelayanan pemeliharaan (*maintenance*) sulit diakses/tidak ekonomis sehingga jika peralatan/mesin rusak maka tidak lagi dapat digunakan.
- Kinerja alat dalam kaitan dengan kelayakan usaha belum diperhitungkan. Kinerja peralatan/mesin bantuan belum dapat menghasilkan pendapatan yang dapat menutupi biaya pengoperasian atau belum memberikan nilai yang berimbang dalam penggunaan waktu, tenaga dan biaya dibandingkan dengan kegiatan ekonomi yang lain.
- Bantuan alat yang disediakan masih parsial, belum sebagai sebuah kesatuan proses industri yg menghasilkan produk pada tingkat tertentu yang dapat dipasarkan dan mendapatkan harga yang layak.
- Keterpaduan dan sinergi belum terbangun atau terkembangkan dengan sektor lain dan antar stakeholders (umpama alat tersedia bahan baku tidak cukup).
- Jaringan pemasaran belum terkembangkan.
- Dukungan Pemda setempat untuk pengembangan agroindustri masih lemah dan perencanaan pengembangan agroindustri belum dibuat.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut diatas perlu menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan alternatif strategi untuk pengembangan agroindustri kakao/coklat di Sumatera Barat.

Setidaknya ada beberapa komponen pokok dari strategi alternatif, yaitu²: perbaikan dan perluasan areal budidaya; penyiapan SDM untuk pengoperasian agroindustri (contohnya fermentasi); penyiapan kerangka kelembagaan dan kepemilikan industri fermentasi kakao, pembangunan industri fermentasi; pengembangan jaringan pemasaran; dan pengembangan industri pengolahan berskala kecil di tingkat lokal untuk menghasilkan produk akhir (utk konsumsi) coklat; pengembangan industri olahan menengah dan besar (dalam jangka panjang), dan pengembangan kebijakan dan mekanisme kelembagaan untuk memberikan dukungan bagi berkembangnya agroindustri kakao/coklat. Perhatian dan penanganan terhadap berbagai aspek tersebut akan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi rakyat berbasis kakao di Sumatera Barat.

Buku ini mengungkapkan realitas dan dinamika dari usahatani dan pengolahan kakao yang dilakukan oleh rakyat di Sumatera Barat. Berdasarkan realitas dan dinamika tersebut kemudian dirumuskan strategi untuk membangun kakao rakyat. Sudah lama ada keinginan untuk mengaplikasikan pendekatan kawasan dalam pembangunan pertanian dan sudah ada beberapa program yang dijalankan, namun kesemua itu memerlukan peningkatan dari waktu ke waktu dan perumusan strategi yang lebih spesifik. Buku ini memberikan sebuah ilustrasi

² Untuk diskusi lengkap tentang ini lihat Heimi (2007) Kerangka Kerja Pengembangan Agroindustri Kakao secara Terpadu dan Sinergi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Perekonomian Daerah Sumatera Barat. Makalah dipresentasikan pada Rapat Kerja 2007 Departemen Perindustrian Republik Indonesia, Hotel Pusako, Bukittinggi, 13-16 Maret 2007.

empiris bagaimana kawasan agroindustri, khususnya kakao, dapat dikembangkan di Sumatera Barat.

Ke depan, pembangunan pembangunan pertanian perlu terus dilakukan berdasarkan pemahaman empiris yang memadai dan perspektif yang tepat sehingga mampu berkontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang terbuka. Dalam kaitan ini maka penghargaan perlu diberikan kepada peneliti/penulis yang telah melakukan penelitian dan mempersiapkan naskah buku ini dan pemerintah Propinsi Sumatera Barat yang telah memberikan dukungan bagi terlaksananya kajian yang menjadi dasar penerbitan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam mengambil bagian dan berkontribusi bagi pengembangan kakao rakyat di Sumatera Barat.

Prof.Dr.Ir. Helmi, M.Sc.
Guru Besar Dalam Bidang Ilmu
Pembangunan Pertanian

DAFTAR ISI

Halaman Judul	iii
Sambutan Kepala Dinas Perkebunan	
Propinsi Sumatera Barat	v
Pengantar Penerbit	vii
Pengantar Penulis	ix
Prolog	xiii
Daftar Isi	xxiii
Daftar Tabel	xxvi
Daftar Gambar	xxix
Daftar Lampiran	xxxi
I. PENGEMBANGAN DAN PERMASALAHAN	
PENGOLAHAN KAKAO	1
1.1. Pembangunan Perkebunan	1
1.2. Pembangunan Wilayah dan Pengembangan Kawasan	8
1.3. Pengembangan Kakao	19
1.4. Budidaya Kakao	31
II. PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL	
PERKEBUNAN	47
2.1. Pengertian Agroindustri	48
2.2. Karakteristik Agroindustri	52
2.3. Agroindustri Hasil Pertanian	54
2.4. Pengembangan Industri Pengolahan Kakao..	60

2.5	Permasalahan Pengembangan Industri Pengolahan Kakao Fermentasi.....	67
2.6	Studi Kelayakan.....	70
III. REALITAS PERKEBUNAN KAKAO RAKYAT DI KAWASAN SENTRA PRODUKSI SUMATERA BARAT		
		77
3.1	Potensi Pengembangan Pengolahan Kakao Fermentasi Berbasis Kawasan Sentra Produksi....	78
3.2	Permasalahan Pengembangan Pengolahan Kakao Fermentasi Berbasis Kawasan Sentra Produksi.....	105
IV. PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO FERMENTASI BERBASIS KAWASAN SENTRA PRODUKSI DI SUMATERA BARAT.....		
		119
4.1	Profil Perkebunan Kakao di Sumatera Barat.....	122
4.2	Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Kakao Fermentasi Berbasis Kawasan Sentra Produksi di Sumatera Barat.....	130
4.3	Kerangka Kerja Pengembangan Industri Pengolahan Kakao.....	138
V. MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO FERMENTASI DI SUMATERA BARAT		
		151
5.1	Tujuan Kebijakan	152
5.2	Sasaran Kebijakan	152

5.3 Arah Kebijakan Pengembangan Industri	
Pengolahan Kakao	154
5.4 Program.....	157
5.5 Agenda Kegiatan	158
VI. PENUTUP.....	163
DAFTAR PUSTAKA	169
LAMPIRAN	175